

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menghambat tumbuh kembang anak berdasar pada ketidak seimbangan gizi kronis yang disebabkan oleh multifactor (Aryastami, 2017). Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki prevalensi Stunting tinggi, yaitu mencapai 34,1 % dengan posisi keempat tertinggi di Sulawesi-Selatan (SSGI, 2022). Tingginya angka Stunting di Kabupaten Toraja Utara menjadi masalah krusial yang meresahkan banyak pihak, dalam hal ini karena potensi Stunting itu mengancam stabilitas dan kualitas perkembangan sumber daya manusia.

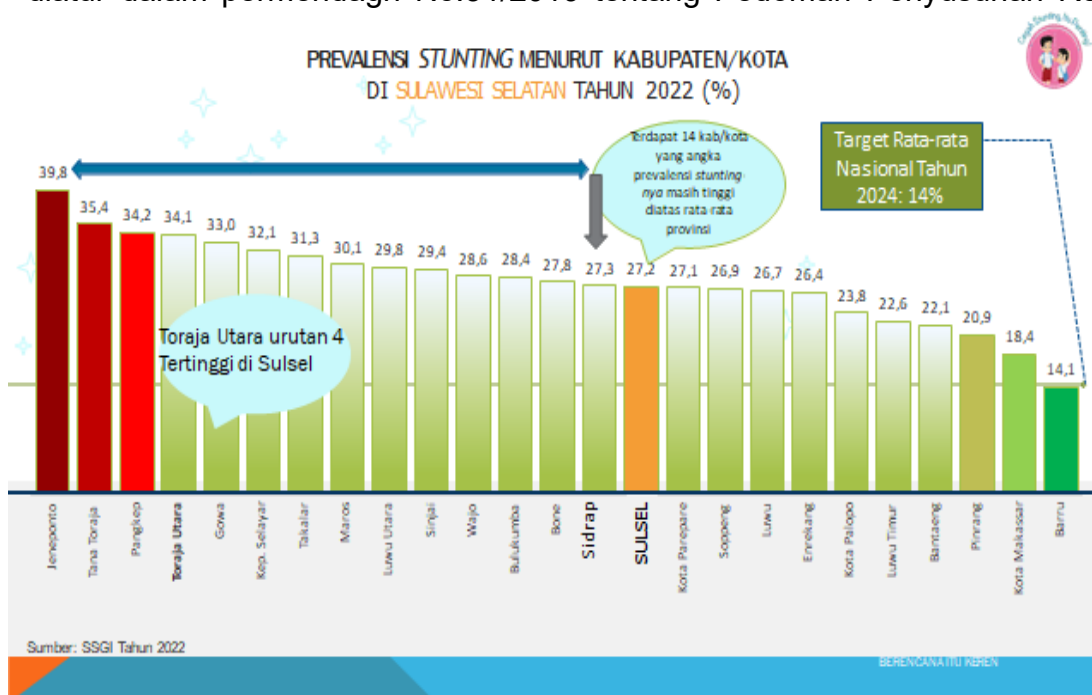
Percepatan penurunan stunting di Indonesia merupakan salah satu isu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Stunting merupakan permasalahan yang serius karena akan memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting dapat meningkatkan risiko kematian bayi dan balita serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Stunting juga dapat menghambat pertumbuhan kognitif, perkembangan motorik, dan kemampuan bahasa (WHO, 2013). Secara jangka panjang, stunting akan menimbulkan stunting lintas generasi serta meningkatkan risiko mengidap penyakit tidak menular di masa dewasa (Trihono et al., 2015).

Menurut Hoddinott dalam Stewart (Stewart et al., 2013), Stunting memiliki konsekuensi ekonomi yang penting di tingkat individu, rumah tangga dan komunitas. Apabila masalah stunting dan masalah gizi lainnya tidak ditangani dengan serius maka diperkirakan Indonesia akan kehilangan produk domestik bruto (PDB) sebesar 2-3% setiap tahun (Bappenas, 2019). Angka prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, masih cukup tinggi yaitu sebesar 30,8% (Balitbang Kemenkes RI, 2018). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi stunting di dunia pada tahun yang sama yaitu 21,3% (Roediger et al., 2020).

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia menurun menjadi 14%. Target tersebut dapat tercapai dengan melibatkan peran multisektor dan memastikan adanya sinkronisasi program dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa (Bappenas, 2019). Langkah yang ditempuh untuk mempercepat pencapaian target tersebut adalah dengan menentukan kabupaten/kota dan/atau desa tertentu sebagai fokus. Jumlah kabupaten/kota fokus ini akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh kabupaten/ kota di Indonesia. (Bappenas, 2019).

Sumber SSGI 2022

Upaya mendorong sinkronisasi program percepatan penurunan stunting juga diatur dalam permendagri No.31/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah Tahun 2020. Permendagri ini mengamanatkan pemerintah daerah agar memasukkan kegiatan percepatan penurunan stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan intervensi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting agar dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa. Oleh karena itu, Kabupaten/kota terutama yang menjadi kabupaten prioritas harus melakukan upaya dalam percepatan penurunan stunting. Upaya ini merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama. dalam merespon permasalahan Stunting yang cukup serius ini, pemerintah pusat meluncurkan

sebuah regulasi khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, regulasi ini merupakan hasil perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang masih belum optimal dalam mengakomodasikan upaya penurunan Stunting.

Salah satu kabupaten yang menjadi prioritas untuk percepatan penurunan stunting adalah Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan data riskesdas 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Toraja Utara sebesar 32,6% dan mengalami kenaikan 1,5% di tahun 2022 yaitu sebesar 34,1%. Sementara itu Kecamatan yang tertinggi stuntingnya di Kabupaten Toraja Utara yaitu Kecamatan Rindingallo dimana di tahun 2022 sebanyak

273

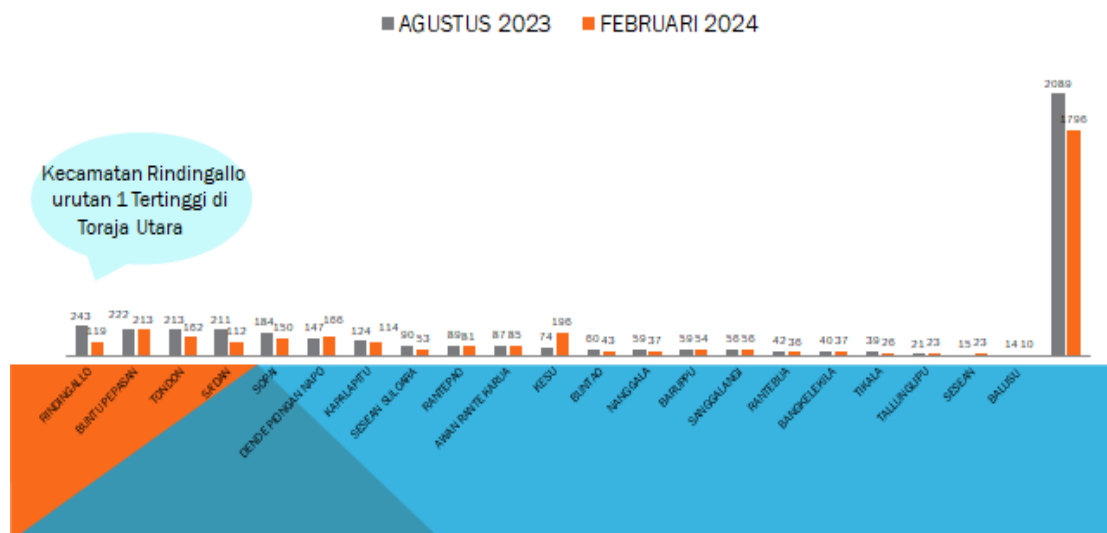
SEBARAN ANGKA STUNTING TINGKAT KECAMATAN KAB. TORAJA UTARA SUMBER EPPGBM

(39,4%)

dan

tahun

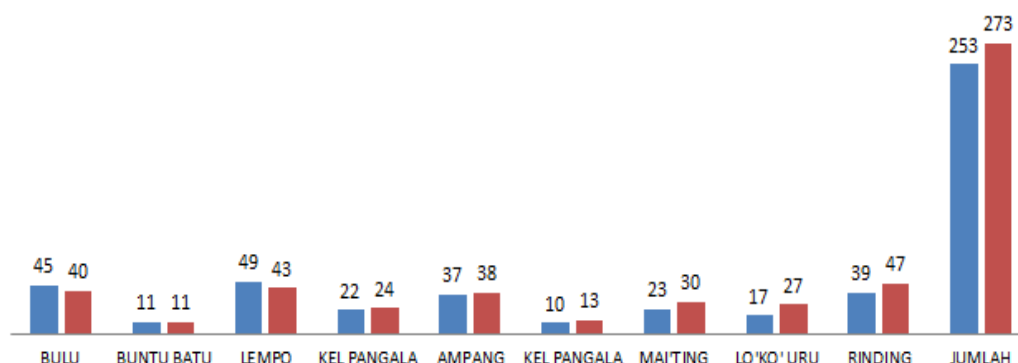
2023



sebanyak 253 (37,32%).

STATUS BALITA STUNTING BERDASARKAN LEMBANG/KELURAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

■ AGUSTUS 2022 ■ FEBRUARI 2023



Gambar 1.1 Data Stunting Kecamatan Rindingallo

Tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan kajian mengingat pertumbuhan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Toraja Utara dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam penurunan stunting membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Lembang/Desa yang melibatkan semua unsur Bupati, Wakil Bupati, Sekda, TNI, Polri, Camat, Lurah, Kepala Lembang/Desa, PKK, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) di dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPK) tingkat Kecamatan dimana dalam 1 Tim terdiri dari 3 unsur Bidan, PKK dan Kader KB, di Kecamatan Rindingallo ada 20 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 2 Kelurahan dan 7 Lembang/Desa.

Dalam upaya percepatan penurunan prevalensi angka stunting, salah satu upaya yang dilakukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) adalah pendampingan kepada keluarga berisiko stunting yaitu terhadap calon pengantin, pendampingan kepada ibu hamil, pendampingan kepada ibu pasca persalinan atau ibu menyusui dan pendampingan kepada bayi baru lahir hingga usia 2 (dua) tahun. Pendampingan keluarga dilaksanakan pada tingkatan desa/kelurahan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim Pendamping Keluarga (TPK) ditetapkan berdasarkan SK pejabat yang berwenang antara lain dari Kepala Daerah Bupati.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, telah dibentuk Tim Pendamping Keluarga untuk melaksanakan

kegiatan pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga melalui kegiatan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Kegiatan Orientasi Tim Pendamping Keluarga dilaksanakan oleh BKKBN bekerjasama dengan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tim Pendamping Keluarga dalam melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Undang- Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting; Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Orientasi Tim Pendamping Keluarga Tahun 2022.

Pada tanggal 3 Maret 2022, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menandatangani naskah komitmen sebagai salah satu kabupaten prioritas dalam program percepatan penurunan stunting. Program ini dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Program intervensi gizi spesifik merupakan program yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. sementara itu, program intervensi gizi sensitif merupakan program yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

Sebanyak 7 Lembang/desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Rindingallo dalam penyusunan dan pelaksanaan program. SKPD terkait diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan terkait cakupan layanan mereka di setiap desa lokus yang dapat berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan program TPK perlu dikaji apakah program yang dilaksanakan telah sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Faktor- faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting juga merupakan informasi yang sangat penting untuk diketahui. Kajian Permanasari (Permanasari et al.,2020) menganalisis permasalahan apa yang dihadapi dalam implementasi program dalam upaya pencegahan stunting pada kabupaten prioritas berdasarkan konten, konteks, proses, dan aktor. serta pemahaman yang belum menyeluruh mengenai pendampingan TPK yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan upaya penurunan stunting.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Suprihatono menyatakan bahwa masih banyak permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Program yang disusun belum sepenuhnya dilaksanakan, cakupan program, kualitas dan sasarannya masih rendah dan koordinasi antar kementerian dan lembaga juga belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan program (Suprihartono et al., 2019).

Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan upaya penurunan angka prevalensi stunting dengan pendekatan kualitatif juga telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman (Syafrina, 2018) dalam penelitian ini berfokus pada penilaian komitmen pemerintah setempat dengan mengacu pada Nutrition Commitment Index (NCI) 2018 dan menyimpulkan bahwa Ada 6 indikator yang tidak mencapai target diantaranya anggaran program gizi (stunting) yang masih kurang, cakupan Vitamin A, cakupan air bersih cakupan sanitasi, kunjungan ibu hamil dan tidak ada regulasi/hukum tentang perbaikan gizi.

Merujuk hasil penelitian terdahulu, kajian yang dilakukan pada umumnya membahas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program pendampingan Tim Pendamping Keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kajian mengenai sejauh mana efektivitas pendampingan dalam upaya percepatan penurunan stunting belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, perlu dievaluasi bagaimana efektivitas pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya percepatan penurunan stunting dikecamatan rindingallo, Kabupaten Toraja Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Program percepatan penurunan stunting diharapkan menjadi program yang berkelanjutan sehingga kualitasnya berusaha untuk terus ditingkatkan. Salah satu parameter kualitas program adalah tingkat efektivitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengetahuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengenai Stunting.?
2. Bagaimana efektivitas pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menilai Pengetahuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengenai Stunting
2. Menganalisis efektivitas pendampingan TPK dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Rindingallo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi kontribusi apa saja yang diberikan setelah penelitian selesai. Studi ini diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi keilmuan pada program studi Magister Kesehatan khususnya mengenai Efektivitas Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan isu stunting. sebagai tugas kuliah terakhir di fakultas Kesehatan Reproduksi sebagai bagian dari program studi “Magister Kesehatan” Universitas Mega Buana Palopo.

2. Manfaat praktis

Untuk peneliti selain berfungsi sebagai pelatihan untuk menulis artikel akademis dalam upaya penelitian di masa depan, penelitian ini diharapkan akan menjadi arsip karya ilmiah, menginspirasi para peneliti untuk segera mengejar gelar Magister di bidang ilmu kesehatan.

3. Untuk Universitas Mega Buana Palopo.

Kajian ini diharapkan dapat melengkapi literatur Universitas Mega Buana Palopo. dalam mengembangkan tradisi pemikiran dan sebagai contoh untuk penelitian selanjutnya terkait dengan fokus penelitian pada Efektivitas pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pengasuhan anak usia dini khususnya pada masalah stunting.

4. Untuk masyarakat umum

Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi lebih lanjut mengenai stunting dan transfer keterampilan ke profesi lain.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan informan terkadang tidak menunjukkan pendapat informan yang sebenarnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat informan dalam memberikan informasi dan keterbatasan lainnya adalah waktu penelitian yang sangat singkat yaitu hanya satu bulan.